

**ANALISIS KINERJA APARATUR DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
DI DESA LUBUK LANGKAP KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

SKRIPSI



Oleh :

Nandi Tarnando
NPM : 1963201040

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

2025

**ANALISIS KINERJA APARATUR DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
DI DESA LUBUK LANGKAP KABUPATEN BENGKULU
TENGAH**

SKRIPSI



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Administrasi Publik pada Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Oleh :

Nandi Tarnando
NPM : 1963201040

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

2025

PERSEMBAHAN

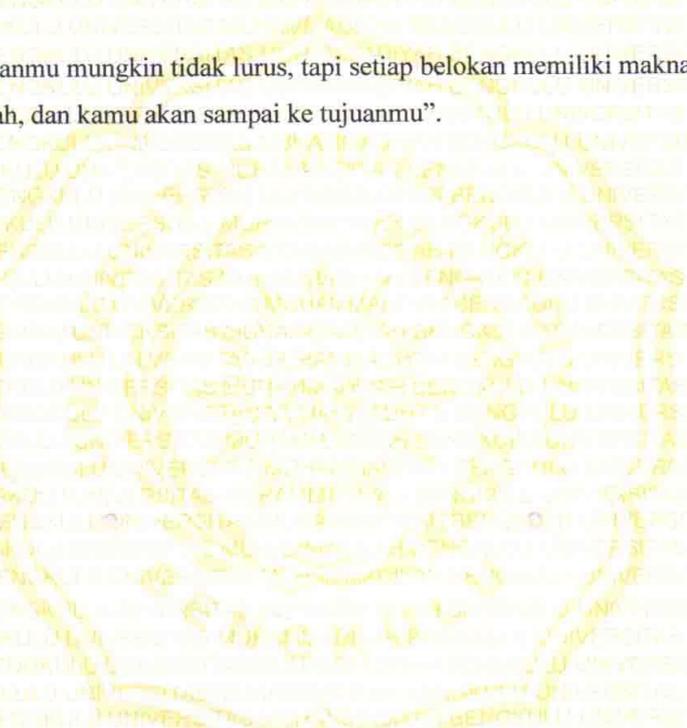
Alhamdulillah kupersembahkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kesempatan memberikan kemudahan sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan. Segala syukur atas karunia-Mu menghadirkan mereka yang selalu memberi semangat dan doa disaat kutertatih. Skripsi ini Saya persembahkan kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi :

1. Kedua orang tua ku tercinta Bapak Kartawi dan Ibu Harmili yang selalu memberiku do'a, kasih sayang, nasehat, dan cinta kasih yang tiada terhingga. Selalu memberi dukungan dan semangat di setiap langkah hidupku untuk menggapai cita-cita dan kesuksesan hingga saat ini.
2. Keluarga Besarku yang selalu membantu dari segi motifasi ataupun material, memberikan semangat baru dan aku banggakan terimah kasi atas do,a dan dukungan kalian.
3. Kepada diri ku sendiri terimakasih sudah berani sepanjang jalan ini, terimakasih sudah kuat dalam menjalani berbagai rintangan yang telah dihadapi, terimakasih untuk diriku mari kita berjuang sedikit lagi, semangat.
4. Agama dan Almamater Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” QS Ar Rad 11

“Perjalananmu mungkin tidak lurus, tapi setiap belokan memiliki makna. Teruslah melangkah, dan kamu akan sampai ke tujuanmu”.



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nandi Tarnando
NPM : 1963201040
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Alamat Rumah : Desa Lubuk Langkap Kecamatan Bang Haji Kabupaten
Bengkulu Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul “**ANALISIS KINERJA APARATUR DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DI DESA LUBUK LANGKAP KABUPATEN BENGKULU TENGAH**”. Adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 18 Februari 2025

Pembuat Pernyataan



Nandi Tarnando
NPM : 1963202040

HALAMAN PEMBIMBING

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA APARATUR DESA DALAM PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DESA DI DESA LUBUK LANGKAP KABUPATEN BENGKULU

TENGAH

Oleh : Nandi Tarnando

NPM : 1963202040

Program Studi : Administrasi Publik

Dosen pembimbing

Rosidin, M.Si

NBK. 132983373

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Lubuk Langkap Kabupaten Bengkulu Tengah, telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Maret 2025

Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji
Ketua

Dr. Titi Darmi, M.Si
NIDN. 0219017102

Anggota 1

Dr. Sri Indarti, M.Si
NIDN. 0219017102

Anggota 2

Rosidin, M.Si
NBK. 132983373

Mengetahui
Dekan,

Dr. Juliana Kurniawati, M.Si
NBK : 1291089343

CURRICULUM VITAE

Nama : Nandi Tarnando

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat/ Tanggal Lahir : Lubuk Langkap, 23 Oktober 1999

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat Rumah : Desa Lubuk Langkap Kecamatan Bang Haji
Kabupaten Bangkulu Tengah

Telp/HP : +6289504407455

Alamat Email : nanditarnando8@gmail.com

Nama Ayah : Kartawi

Nama Ibu : Harmili

Pekerjaan Orang Tua : Petani

Pendidikan Formal :

1. SD : SD Negri 72 Bengkulu Tengah
2. SMP : SMP Negri 02 Bengkulu Tengah
3. SMK : SMK Negri 01 Bengkulu Tengah

ABSTRAK

ANALISIS KINERJA APARATUR DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DI DESA LUBUK LANGKAP KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Oleh :

Nandi Tarnando
1963201040

Dosen Pembimbing : Rosidin, M.Si

Kinerja perangkat desa sangatlah penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa, yang mana mempunyai unsur besar baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan desa sangat tergantung pada kinerja aparatur desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Perangkat desa bertugas untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka dari itu pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yang pertama Bagaimana Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Lubuk Langkap Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, kedua Apa Saja Faktor Penghambat Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Lubuk Langkap Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Aparatur Desa di Desa Lubuk Langkap tingkat kinerjanya belum maksimal, hal ini dikarenakan fasilitas kantor belum lengkap dan juga kurangnya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Selain itu masih ada juga beberapa Aparatur Desa tersebut belum bisa mengoperasikan komputer dan juga tidak bisa mengakses internet. Kurangnya pengetahuan dan inisiatif dalam bekerja, dan juga kurangnya tanggung jawab dan disiplin waktu sehingga membuat pekerjaan yang terhambat. Dari beberapa penjelasan dapat disimpulkan bahwa Aparatur Desa, Desa Lubuk Langkap masih butuh banyak pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kinerja para Aparatur Desa. Adapun saran bagi Aparatur Desa untuk meningkatkan lagi kualitas kerjanya dan untuk Kepala desa agar diperhatikan lagi kelengkapan kantor Desa agar hasil kinerja Aparatur Desa dapat lebih maksimal.

Kata Kunci : Analisis, Kinerja, Aparatur Desa

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF VILLAGE OFFICIALS' PERFORMANCE IN THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE GOVERNANCE IN LUBUK LANGKAP VILLAGE, BENGKULU TENGAH REGENCY

By:

Nandi Tarnando

1963201040

Supervisor:

Rosidin, M.Si.

The performance of village officials plays a crucial role in the effectiveness of village governance, as the quality of governance largely depends on the efficiency and capability of these officials. Village officials are responsible for delivering public services that meet the needs of the community. This study focuses on two key issues: first, an analysis of the performance of village officials in implementing governance in Lubuk Langkap Village, Bang Haji District, Bengkulu Tengah Regency; and second, the factors that hinder their performance. This research employs a qualitative descriptive approach. The findings reveal that the performance of village officials in Lubuk Langkap Village remains suboptimal. This is due to inadequate office facilities, as well as a lack of training and human resource development. Additionally, some officials struggle with basic technological skills, such as operating computers and accessing the internet. Other challenges include limited knowledge, lack of initiative, poor responsibility, and weak time discipline, all of which contribute to workflow inefficiencies. Based on these findings, it can be concluded that village officials in Lubuk Langkap require further training to improve their performance. It is recommended that village officials enhance their work quality, and that the village head ensure the availability of sufficient office facilities to support optimal performance.

Keywords: *Analysis, Performance, Village Officials*

RINGKASAN

Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Lubuk Langkap Kabupaten Bengkulu Tengah : Nandi Tarnando, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mana pelayanan publik merupakan kegiatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi warga negara dan penduduk, barang jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Instansi pemerintah bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat baik itu dalam bidang administrasi maupun di bidang kehidupan sosial lainnya. Pemerintah juga harus bisa menjadi pelopor yang baik dalam menangani semua permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Dalam melayani masyarakat sangat diperlukan birokrasi yang memiliki kualitas dan kuantitas kerja dalam menjalankan tugasnya sebagai Aparatur Desa serta mampu melayani masyarakat secara efektif, efisien, transparan dan berkeadilan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa sangat berkaitan dengan kinerja Perangkat Desa. Perangkat Desa dituntut agar bisa menjadi pegawai yang efektif, efisien, profesional, terbuka serta memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa. Standar Pelayanan Minimal Desa yang menjadi acuan untuk penyelenggaraan pemerintahan di desa. SPM Desa itu sendiri dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat, mempermudah pelayanan, keterbukaan pelayanan kepada masyarakat dan efektivitas pelayanan terhadap masyarakat.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terdapat adanya keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa yang mana kurang optimalnya pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa. Permasalahan yang sering terjadi yaitu khususnya

mengenai perangkat desa dalam memberikan pelayanan yang mana diantaranya staf yang berwenang untuk mengurus keperluan masyarakat tidak ada di tempat saat jam kerja. Sehingga masyarakat kesulitan untuk menyelesaikan kepentingannya. Adapun faktor yang menjadi hambatan kinerja perangkat desa di Lubuk Langkap Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah ini yaitu kurangnya peralatan dan perlengkapan kerja, kurangnya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia serta masih adanya keterbatasan penggunaan komputer atau alat teknologi lainnya.

PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Lubuk Langkap Kabupaten Bengkulu Tengah”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dukungan dan bantuan banyak penulis dapatkan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Juliana Kurniawati, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang telah banyak memberikan arahan dan nasehat.
2. Bapak Rosidin, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan waktu, pikiran, dan tenaganya dalam memberikan nasehat dan masukan terbaik selama proses penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Dr. Novliza Eka Patrisia, M.Si. selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
4. Teman-teman seperjuangan sekaligus yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dorongan dan semangat.

Ahir kata penulis berharap kiranya laporan penelitian dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan masyarakat pada umumnya, Aamiin.

Bengkulu, 11 Maret 2025

Penulis



Nandi Tarnando

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
CURRICULUM VITAE	viii
ABSTRAK	ix
RINGKASAN	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TEBEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Maanfaat Praktis.....	8
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Pelayanan Publik.....	14
2.2.1 Definisi Pelayanan Publik.....	15
2.2.2 Ruang Lingkup Pelayanan Publik.....	16
2.3 Kinerja.....	17
2.4 Aparatur Desa	18
2.5 Definisi Kinerja	24
2.5.1 Penilaian Kinerja	25
2.6 Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	27
2.6.1 Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	28
2.7 Kerangka Berpikir.....	31
BAB III	33
METODE PENELITIAN	33
3.1 Pendekatan Penelitian	33
3.2 Fokus Penelitian	33
3.3 Aspek Penelitian	34
3.4 Tempat Penelitian	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Informan Penelitian	37

3.7 Teknik Analisis Data	38
BAB IV	40
HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum Desa.....	40
4.2 Identitas responden	44
4.3 Hasil Penelitian	45
4.3.1 Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	45
4.3.2 Faktor penghambat Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	51
4.4 Pembahasan	52
4.4.1 Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	52
4.4.2 Faktor Penghambat Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	54
BAB V	56
PENUTUP	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	62

DAFTAR TEBEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Aspek Penelitian	31
Tabel 2. Jumlah Informan	34
Tabel 3. Jumlah Penduduk	38
Tabel 4. Tingkat Pendidikan	39
Tabel 5. Pekerjaan	39
Tabel 6. Daftar Responden	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Kerangka pemikiran	29
Gambar 2. Struktur Organisasi Desa	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan mendasar dari keberadaan lembaga pemerintah adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam kapasitas administrasi maupun berbagai aspek lain dari keberadaan masyarakat. Pemerintah berkewajiban untuk mengambil peran utama dalam mengatasi semua tantangan sosiokultural yang berlaku dalam masyarakat. Melayani masyarakat secara efektif memerlukan struktur birokrasi yang mewujudkan akuntabilitas dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai perwakilan negara, sehingga memungkinkannya untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan cara yang efektif, efisien, transparan, dan adil. Melalui penerapan kerangka tata kelola yang terdesentralisasi, diharapkan bahwa Republik Indonesia akan meningkatkan jangkauan birokrasi, karena pemerintah daerah akan memiliki otonomi untuk menjalankan kekuasaannya tanpa menunggu arahan dari otoritas pusat. Mengingat kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia yang signifikan, perumusan kebijakan kemungkinan akan memperkuat kemampuan tata kelola daerah.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. Pemberlakuan legislatif ini berfungsi sebagai kerangka hukum dasar tata kelola administrasi publik, yang bertujuan untuk meningkatkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus mengurangi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akibatnya, undang-undang ini diantisipasi untuk mendorong sistem birokrasi yang semakin meningkat, transparan, dan efisien. Regulasi administrasi pemerintah pada dasarnya

merupakan inisiatif untuk menanamkan prinsip demokratis, obyektif, dan profesional, kerangka kerja mental, sikap, perilaku, norma budaya, dan modalitas perilaku administratif, dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014, khususnya Pasal 23 dan Pasal 24 tentang Desa, menggambarkan bahwa administrasi desa disusun melalui pemerintahan desa. Organisasi Pemerintah Desa didasarkan pada prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, tata kelola sistematis, prioritas kepentingan publik, transparansi, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, serta efisiensi dan efektivitas, sementara juga mencakup kearifan lokal, keragaman, dan keterlibatan partisipatif. Dalam melaksanakan tata kelola, Pemerintah menganut prinsip-prinsip desentralisasi, tugas relief, dan desentrasi sejalan dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam konteks penataan tata kelola di dalam desa, sangat penting untuk mengakui peran integral aparatur desa. Oleh karena itu, sangat penting bahwa aparat desa menunjukkan profesionalisme, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kepala desa bertanggung jawab untuk mengawasi kerangka administrasi ini kepada Badan Permusyawaratan Desa dan selanjutnya menyerahkan laporan yang merinci pelaksanaan administrasi kepada Bupati.

Kehadiran desa berfungsi sebagai indikator penting dari kemandirian dan kekurangan pemerintahan suatu bangsa, serta aktualisasi prinsip-prinsip

demokrasi di dalam lokalitas. Lingkungan seperti itu sangat diperlukan untuk keterlibatan dan partisipasi masyarakat desa dalam membina masyarakat yang demokratis. Personil harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berkomunikasi secara efektif dan memanfaatkan instrumen teknologi yang meningkatkan efisiensi operasional; Selanjutnya, untuk mencapai kinerja yang optimal, harus ada alokasi tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik.

Salah satu aspek fundamental dari manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) melibatkan alokasi strategis personel berdasarkan kompetensi mereka untuk memfasilitasi kinerja yang optimal. Ungkapan yang umum digunakan untuk merangkum konsep ini adalah individu yang tepat dalam posisi yang sesuai. Dalam hal ini, pemimpin harus memiliki kapasitas untuk membedakan kemampuan atau kompetensi karyawan mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk menugaskan individu ke peran yang selaras dengan keahlian mereka. Penyelarasan ini sangat penting, karena secara signifikan mempengaruhi hasil kinerja secara keseluruhan. Jika karyawan kami tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan keterampilan yang mereka tunjuk, jelas bahwa kinerja yang dihasilkan tidak akan memenuhi standar yang kami antisipasi.

Kinerja, didefinisikan sebagai kinerja kerja, merupakan puncak dari output kualitatif dan kuantitatif yang dicapai oleh seorang karyawan saat melaksanakan tanggung jawab mereka sejalan dengan kewajiban yang diberikan kepada mereka, sebagaimana diartikulasikan oleh Anwar Prabu (2004). Penurunan kinerja seringkali berasal dari kekurangan sumber daya manusia, yang tidak memadai sebagai produsen barang atau jasa. Akibatnya, peningkatan kinerja organisasi

secara intrinsik terkait dengan kemandirian sumber daya manusianya. Potensi sumber daya manusia merupakan aset fundamental dalam konteks pembangunan nasional; Namun, secara luas diakui bahwa potensi ini tetap kurang dimanfaatkan, terutama mengingat bahwa keahlian dan pencapaian pendidikan dari sebagian besar tenaga kerja masih kurang optimal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggambarkan kerangka tata kelola di tingkat desa. Sebuah desa merupakan entitas yuridis yang dicirikan oleh batas-batas teritorial yang digambarkan, yang diberdayakan untuk mengelola dan melindungi kepentingan penduduk setempat, yang didasarkan pada asal-usul dan adat istiadat adat yang diakui dan dihargai dalam kerangka pemerintahan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang berfungsi sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menetapkan ketentuan yang berkaitan dengan Organisasi Desa, Otoritas, Tata Kelola Desa, Tata Cara Perumusan Peraturan Desa, Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Desa, Pembangunan Desa bersama Kemajuan Desa, Usaha Milik Desa, Kolaborasi Desa, Lembaga Masyarakat di Desa, Lembaga Adat Desa, serta pengawasan dan pengembangan Desa oleh Camat atau pejabat yang setara.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa dan perwakilan kepentingan masyarakat lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia digambarkan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam struktur hierarkis wilayah administrasi Indonesia, administrasi desa beroperasi sebagai komponen di dalam kecamatan. Tata kelola

desa dipimpin oleh seorang individu yang ditunjuk sebagai kepala desa. Administrasi desa berfungsi sebagai subsistem integral dari struktur administrasi yang lebih luas, sehingga memberikan kepada desa wewenang yang diperlukan untuk mengelola dan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan komunitasnya (Widjaja, 2013).

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk melaksanakan semua tugas yang diberikan dan menjalankan wewenangnya dalam upaya koordinasi tata kelola desa, yang bertujuan untuk mewujudkan visi menyeluruh dan terlibat dalam praktik yang adil mengenai pembangunan desa, sehingga menghilangkan setiap wacana mengenai aparatur desa yang memprioritaskan kepentingan individu atau keluarga atau hanya ada sebagai entitas nominal tanpa memenuhi kewajibannya secara efektif.

Personel administrasi Desa Lubuk Langkap, yang terletak di Kabupaten Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, menunjukkan kekurangan ketepatan waktu terkait kehadiran mereka, yang masih kurang optimal. Kekurangan ini secara signifikan merusak kualitas kerja secara keseluruhan, terutama dalam kaitannya dengan manajemen waktu dan penyelesaian tugas yang diberikan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan tanggung jawab mereka, Aparatur Desa tersebut sering menunjukkan keterlambatan dalam penyerahan dokumentasi yang diperlukan, termasuk profil desa dan penyusunan dokumen penting seperti kartu keluarga (KK) dan surat domisili (Domisili). Akibatnya, penduduk setempat mengalami masa tunggu yang lama ketika mencari untuk mendapatkan dokumen-dokumen penting ini.

Kemahiran dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di kalangan personel Desa Lubuk Langkap ditandai dengan kekurangan yang mencolok dalam literasi komputer di antara individu-individu tertentu. Selain itu, ketersediaan sumber daya dan infrastruktur penting, seperti perangkat komputasi, tetap sangat terbatas. Tanggung jawab terhadap pengembangan masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan akses ke air bersih dan fasilitas yang memadai untuk latihan fisik, memberikan pengaruh besar pada lintasan perkembangan anak-anak, yang mewakili generasi masa depan. Selain itu, kurangnya pengawasan dan regulasi yang ketat dalam kerangka tata kelola desa telah berkontribusi pada jam kerja yang semakin tidak menentu, sehingga mempersulit keterlibatan individu dengan kepentingan pribadi di kantor administrasi desa.

Perilaku kerja dan sikap bersahabat warga Lubuk Langkap, Kec Bang Haji, Kab Bengkulu Tengah menumbuhkan rasa kedekatan dengan aparat tata kelola desa. Mengingat masalah ini, pemerintah desa di Desa Lubuk Langkap, yang terletak di Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, diharuskan untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka dengan sangat serius. Kemanjuran kinerja berfungsi sebagai indikator penting untuk pembentukan tata kelola yang efektif. Kinerja mewujudkan hasil yang dihasilkan oleh Badan Desa yang bertujuan memajukan desa sesuai dengan prinsip-prinsip kinerja yang ditetapkan. Oleh karena itu, penulis telah mengembangkan minat dalam memeriksa kinerja aparatur desa dalam konteks organisasi pemerintahan desa; dengan demikian, peneliti telah merumuskan judul “Analisis Kinerja Aparatur dalam Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Lubuk Langkap Kabupaten Bengkulu Tengah.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Analisis Kinerja Aparatur Desa dalam penyelenggaraan pemerintah Desa di Desa Lubuk Langkap Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Apa saja faktor penghambat Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Lubuk Langkap Kabupaten Bengkulu Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis kinerja aparatur Desa dalam penyelenggaraan pemerintah Desa di Desa Lubuk Langkap Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Untuk menganalisis faktor penghambat Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Lubuk Langkap Kabupaten Bengkulu Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

Berkenaan dengan keuntungan yang diantisipasi para sarjana yang timbul dari disertasi penelitian ini, ini mencakup:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemahiran penulis dalam melaksanakan penelitian ilmiah sambil secara bersamaan mengartikulasikan temuan penelitian tersebut dalam bentuk tertulis.
2. Untuk menambah pemahaman tentang penerapan pengetahuan yang diperoleh selama kuliah akademik, memfasilitasi praktik melakukan penelitian yang mahir sangat penting.
3. Selanjutnya diantisipasi bahwa hasil penelitian ini akan menjelaskan kemandirian Aparatur Desa dalam administrasi tata kelola desa di Desa Lubuk Langkap, yang terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hal ini diantisipasi bahwa hal ini akan berdampak positif bagi individu, karyawan di Desa Lubuk Langkap, serta para pemangku kepentingan, dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang inersia yang ditunjukkan oleh aparat desa.